

PENDAHULUAN

Siswa yang disiplin dan tidak melanggar aturan sekolah adalah siswa yang diharapkan oleh semua guru dan orang tua. Kedisiplinan siswa menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah pendidikan. Maka dari itu, kedisiplinan siswa selalu dituntut oleh lingkungan di mana pun berada. Siswa dapat disebut disiplin karena mampu mengendalikan diri untuk selalu taat aturan meski tanpa pengawasan pihak lainnya (Lutfia Yasmin, Santoso, & Utaya, 2016). Disiplin sendiri menjadi satu dari dua faktor yang memengaruhi prestasi belajar siswa setelah motivasi belajar (Lomu & Widodo, 2018). Disiplin yang dilakukan secara sukarela akan mudah untuk menjadi kebiasaan (Indah, 2016).

Disiplin yang merupakan suatu perilaku sadar aturan dapat terbentuk oleh lingkungan individu tersebut. Paradigma behavioristik memandang perilaku dibentuk oleh lingkungan yang dimanifestasikan menjadi penghargaan dan hukuman. Artinya, penghargaan dan hukuman berpengaruh atas keterlanjutan perilaku individu, yang dalam konteks ini adalah siswa. Hukuman yang diberikan ke siswa memang mengubah perilaku siswa, namun penghargaan ke siswa lebih besar pengaruh baiknya daripada hukuman (Ali, Dada, Isiaka, & Salmon, 2014). Kendati demikian, keduanya tidak mengubah perilaku dalam sekejap.

Sekolah dalam mewujudkan siswa yang disiplin akan membuat aturannya sendiri, yang kelak dinamakan peraturan sekolah. Peraturan sekolah yang dibuat wajib disetujui serta ditaati oleh semua warga sekolah. Peraturan sekolah akan berdampak positif bila apa yang dicantumkan di dalamnya disikapi dengan benar (Dinasyari, 2018). Sikap yang tepat terhadap peraturan adalah salah satu bentuk kedisiplinan.

Kenyataannya, tidak semua siswa adalah siswa yang disiplin, sering kita jumpai secara langsung atau lewat media sosial beberapa siswa yang melanggar aturan atau siswa yang indiscipliner. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, indiscipliner merupakan tindakan tidak patuh pada aturan atau melanggar disiplin kerja. Penelitian terdahulu mengenai efek tindakan indisciplin terhadap performa

akademik menyatakan bahwa tindakan indisiplin di sekolah merupakan perilaku merusak yang tidak mencerminkan kerukunan dan kebersamaan dalam berkehidupan, yang dalam hal ini konteksnya ada di sekolah (Ofori, Tordzro, Asamoah, & Achiaa, 2018).

Kasus indisiplin dapat kita temui di banyak sekolah saat ini, dari kasus yang dapat dikategorikan ringan hingga berat. Contoh yang baru saja terjadi adalah siswa yang melawan guru di salah satu sekolah di Gresik. Siswa yang kedapatan merokok di kelas, dengan topi hitam dan seragam pramukanya yang tidak rapi terlihat mencekik leher gurunya ketika hendak ditegur karena melanggar aturan. Efek perbuatan tersebut pasti ada di kedua belah pihak, siswa menjadi perundungan khalayak ramai karena videonya tersebar lewat media sosial dan kemungkinan guru menjadi sungkan ketika ia menasehati siswa lain (Antara, 2019). Kasus penganiayaan guru oleh siswa adalah satu dari pelbagai tindakan indisiplin siswa yang kerap kita temui akhir-akhir ini. Di pertengahan bulan Januari lalu, 23 siswa SMA dan SMP di Kediri bolos sekolah dan terjaring razia Satpol PP. Alasan mereka bolos sekolah bermacam-macam, dari telat masuk sekolah karena terjebak macet hingga memang sengaja bolos sekolah (Mashudi, 2019). Pelanggaran semacam ini tentunya akan merugikan siswa sendiri, salah satunya adalah tertinggal materi pelajaran.

Bentuk-bentuk tindakan indisiplin yang dilakukan siswa tentunya beraneka ragam, seperti: membolos, *vandalism*, berkelahi, hingga minum alkohol di sekolah (Ngwokabuenui, 2015). Penelitian mengenai indisipliner di Afrika, peneliti mendapatkan data mengenai bentuk-bentuk indisiplin yang menunjukkan bahwa dari sebelas jumlah tindakan indisiplin siswa, satu teratas adalah mencurigai atau prasangka buruk dengan orang lain, tindakan ini mendapat prosentase terbesar yaitu 35,5%. Peringkat kedua diduduki oleh penyalahgunaan narkoba dengan prosentase 22,6%. Peringkat ketiga diduduki oleh dua bentuk pelanggaran yaitu berbicara dengan bahasa daerah yang kotor dan pencurian dengan prosentase sebesar 9,8% (Mwaniki, 2018).

Siswa laki-laki dan perempuan bahkan cenderung berbeda bentuk pelanggarannya. Hasil dari penelitian sebelumnya di Afrika menemukan perbedaan tersebut. Laki-laki banyak melakukan tindakan indisiplin berupa membolos pelajaran, bahkan intensitasnya naik ketika ada acara *market days*. Perempuan banyak melakukan pelanggaran berupa berbicara melalui *handphone* dengan suara yang keras dan terlambat masuk kelas. Selain itu, peneliti juga mendapat hasil bahwa anak laki-laki lebih menyalurkan agresifitasnya secara fisik seperti berkelahi dengan kawan, guru, hingga petugas non-guru (Ababa & Eshetu, 2014).

Tindakan indisiplin di sekolah tidak dapat terjadi tanpa ada alasan, ada banyak pemicu mengapa tindakan indisiplin sampai saat ini masih ada. Setidaknya ada empat penyebab siswa menjadi indisiplin, yaitu: kebiasaan melanggar aturan sejak dini, bentuk konformitas terhadap lingkungan, konsep diri yang gegabah, bahkan juga mencontoh guru yang juga indisiplin (Blegur & Tlonaen, 2017). Selain itu, tindakan indisiplin dapat pula disebabkan oleh lingkungan tempat tinggal yang tidak ramah secara social dan kesalahan pola asuh sewaktu kecil (Ngwokabuenui, 2015). Hubungan yang buruk antara guru dengan murid dan inkonsistensi pemberian hukuman oleh guru akan menimbulkan tindakan indisiplin yang lain dan keterlanjutan tindak pelanggaran tersebut oleh siswa (Mwaniki, 2018).

Peneliti juga menyertakan data penyebab indisiplin pada siswa menurut persepsi siswa sendiri. Dari 23 bentuk penyebab pelanggaran, tekanan oleh teman sebaya mendapat peringkat pertama dengan prosentase 20,8%. Penyalahgunaan obat sebagai pemicu indisiplin mendapat peringkat kedua dengan prosentase 14,6%. Di posisi ketiga terdapat hubungan buruk antar siswa sebagai pemicu tindakan indisiplin dengan prosentase 8,3% (Mwaniki, 2018). Dari faktor-faktor penyebab tersebut, maka muncul dampak tindakan indisiplin.

Tindakan indisiplin tentunya menimbulkan dampak bagi individu itu sendiri. Penelitian di tahun 2018 mendapatkan hasil berupa tiga efek teratas dari

tindakan indisiplin siswa terhadap performa akademik, yang pertama adalah siswa indisiplin sulit untuk konsentrasi dan fokus dalam mengikuti pelajaran. Kedua, siswa indisiplin akan tertinggal materi pelajaran saat mereka bolos sekolah. Ketiga, dikeluarkan oleh sekolah. Efek selanjutnya berupa gangguan bagi siswa lain saat belajar, menghabiskan waktu pelajaran hanya untuk menyelesaikan masalah pelanggaran siswa, dan mengakibatkan guru tidak nyaman di kelas karena pelanggaran siswa. Ketiga efek terakhir mendapat prosentasi yang kecil dibanding dengan tiga efek teratas (Ofori et al., 2018)

Data-data tersebut menunjukkan bahwa indisiplin atau tindakan melanggar memang ada dan bervariasi. Penyebabnya pun juga bermacam-macam, mulai dari individu tersebut, keluarga, lingkungan, hingga pihak sekolah itu sendiri. Maka, sekolah perlu menindaklanjuti para siswa yang indisiplin atau melanggar aturan tersebut. Tindakan bisa berupa hukuman langsung kepada siswa, baik secara fisik maupun nonfisik yang keduanya memiliki efek berbeda.

Hukuman fisik merupakan bentuk hukuman yang dikenakan langsung kepada fisik pelanggar atau bersifat mengenai fisik pelanggar dan memberi kesakitan pada pelanggar secara fisik (Abidin, 2015). Hukuman fisik hanya akan memberi dampak merendahkan martabat guru dalam pandangan murid dan tentunya merusak hubungan antara siswa dengan guru (Khateeb, 2015). Ia juga menambahkan bahwa hukuman fisik hanya dilakukan oleh guru yang tidak profesional. Dampak yang timbul akibat penggunaan hukuman fisik tentu merugikan sekolah, maka sekolah membuat hukuman yang bersifat nonfisik sebagai langkah alternatif agar siswa jera.

Hukuman non fisik dapat dikatakan sebagai hukuman yang sasarannya bukan lagi fisik pelanggar namun pikiran, penderitaan pelanggar akan timbul dalam pikiran, bukan di fisik (Abidin, 2015). Hukuman nonfisik dapat berupa teguran lisan, melaksanakan tugas sekolah, peringatan tertulis (poin), skorsing, dan yang paling berat adalah dikembalikan ke orang tua (Supriadi & Kiftiah, 2014). Hukuman poin merupakan salah satu bentuk hukuman administratif yang

digunakan bilamana siswa melanggar aturan sekolah. Disebut administratif karena bentuknya adalah penulisan poin, tidak ada bentuk perlakuan secara fisik. Tujuan dibuatnya hukuman poin selain untuk mengganti hukuman fisik adalah sebagai bukti catatan untuk ditunjukkan ke orang tua serta menilai sejauh mana siswa telah melanggar aturan.

Prosedur pemberian hukuman poin meliputi pemberian teguran secara lisan terlebih dahulu, apabila siswa masih melanggar maka guru akan memberi teguran secara lisan lagi ditambah pencatatan di buku poin yang nantinya diserahkan oleh pihak BK ke wali kelas agar siswa yang melanggar diberi pembinaan tambahan setiap Senin pagi. Apabila masih melanggar lagi, maka pihak sekolah akan mengundang wali murid untuk datang ke sekolah dan pemberian surat pernyataan (Wijayanti, 2013).

Penelitian terbaru mengenai kedisiplinan untuk tepat waktu, hukuman poin ternyata efektif dalam meningkatkan kedisiplinan (Masruroh, 2018). Hasil penelitian di salah satu SMA di kota Pontianak menunjukkan bahwa siswa yang mendapat hukuman poin akan berubah perilakunya, perubahan perilaku berbeda antar siswa tergantung seberapa banyak poin yang siswa peroleh (Fitriawati, Sulistiyorini, & Parijo, 2017). Namun, tidak semuanya efektif karena masih banyak terjadi pelanggaran di tempat lain. Penelitian di salah satu MAN di Pontianak mendapatkan hasil bahwa rendahnya kesadaran, rasa malu siswa, dan toleransi hukuman oleh guru menjadi faktor yang menyebabkan hukuman poin kurang efektif (Wijayanti, 2013).

Perilaku seseorang yang secara sengaja tentu didasari oleh niat, sedangkan niat sendiri timbul karena ada persepsi dari individu tersebut (Damayanthi, Sujana, & Herawati, 2017). Kamus Besar Bahasa Indonesia mencatat bahwa persepsi merupakan serangkaian kerja otak individu, yang dalam hal ini konteksnya adalah manusia, untuk memaknai suatu hal yang didahului oleh penginderaan. Penelitian sebelumnya memuat hasil bahwa persepsi memiliki sumbangsih sebanyak 10,7% terhadap tindakan taat aturan siswa (Indah, 2016).

Persepsi juga berpengaruh terhadap niat individu ketika akan memulai suatu hal, dalam hal ini adalah persepsi positif yang akan mendukung tindakan positif (Damayanthi et al., 2017).

Persepsi sendiri dipengaruhi antara lain: pengalaman, kecerdasan, empati, ingatan, pendirian, kecemasan, dan penghargaan diri (Anjaryati, 2009 diacu dalam Indah, 2016). Persepsi tentunya memiliki aspek-aspek pendukungnya, aspek itu meliputi: aspek konatif, aspek kognitif, dan aspek afektif (Walgito, 2002). Setidaknya ada empat tahap perubahan persepsi menjadi tanggapan, tahapan dimulai dari proses fisik (panca indera) lalu diterima oleh reseptor (syaraf sensoris), reseptor menyadarkan individu, dan diakhiri dengan tanggapan individu (Walgito, 2002).

Persepsi siswa terhadap hukuman poin berarti bagaimana siswa tersebut memahami, merasakan, dan menindaklanjuti apa yang ia pahami dan rasakan terhadap hukuman poin, siswa akan berperilaku baik apabila aturan poin dirasa sejalan dengan tujuan dan tidak menghambat aktifitasnya, sebaliknya, apabila dirasa tidak sejalan dan menghambat aktifitasnya maka siswa akan mempersipkan aturan poin tersebut dengan berperilaku menyimpang (Arisandy, 2004).

Data lapangan yang pernah diambil beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa di SMA Al Azhar Syifa Budi Solo memang ada tindakan indisiplin oleh siswa. Berbagai bentuk indisipliner antara lain: telat, salah seragam, tidak masuk sekolah tanpa izin, tidak memakai atribut seragam, dan lain-lain. Sekolah menggunakan aturan poin dalam menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Hukuman poin digunakan sekolah sebagai bentuk catatan yang bila sudah mencapai angka tertentu akan ditindaklanjuti secara khusus. Selain itu, hukuman poin juga digunakan sebagai catatan pelanggaran yang akan diserahkan sekolah kepada orang tua siswa atau wali murid.

Data awal penelitian terhadap 42 siswa di SMA Al Azhar Syifa Budi Solo menunjukkan bahwa sebesar 80,9% siswa paham dengan hukuman poin. Kendati demikian, siswa yang senang dengan adanya aturan poin hanya sebesar

38,1%. Aturan yang tertera memang jumlahnya tidak sedikit, setidaknya 95,3% subjek ingat tentang apa saja yang diatur di dalamnya. Salah satu dampak adanya aturan sekolah adalah siswa merasa terkekang, sebesar 59,5% subjek merasa terkekang dengan adanya aturan sekolah. Hasil tersebut berbuntut pada 59,5% subjek menolak adanya aturan sekolah dengan alasan aturannya yang berlebihan dan ada hal sepele yang seharusnya tidak dijadikan aturan.

Siswa yang dijerat hukuman poin tidak semuanya berubah, terbukti dengan tindakan yang dilakukan siswa berinisial MNNA. Tercatat mulai tanggal 14 hingga tanggal 29 Agustus 2019, siswa tersebut melakukan pelanggaran sebanyak sembilan kali dengan koleksi poin 70 poin. Ada pula siswa yang berinisial AEP, dalam kurun waktu yang sama, siswa tersebut sudah melakukan pelanggaran sebanyak empat kali dengan koleksi poin sebanyak 35 poin. Setidaknya ada sepuluh siswa di kelas XII yang telah mengulangi pelanggaran dan mendapat poin. Siswa terkesan tidak jera dengan poin pelanggaran yang mereka peroleh.

Siswa SMA dengan usia rata-rata 16- 18 tahun bila dikaji melalui teori kognitif Piaget termasuk dalam tingkatan operasional formal yang artinya siswa sudah melewati fase pemahaman baik buruk (moral) dan mampu berpikir kritis terhadap suatu hal atau kejadian yang tidak sesuai dengan ekspektasinya (Nurjan, 2016). Benyamin S. Bloom (dalam Nurjan, 2016) mengatakan bahwa tahap akhir dalam tujuan belajar individu yang kaitannya dengan kognitif adalah evaluasi. Individu dapat mengevaluasi terhadap hal/peristiwa yang telah terjadi.

Evaluasi tersebut berlaku juga pada siswa yang telah melanggar aturan. Siswa yang mengulangi pelanggaran yang sama dan tentunya mendapat poin, terkesan tidak dapat mengambil hikmah dari peristiwa tersebut. Siswa masih saja melanggar meski sudah diberi hukuman. Sebagaimana teori *reward and punishment* yang memiliki harapan bahwa dengan pemberian *punishment* (hukuman) terhadap perilaku yang salah; perilaku tersebut tidak diulagi. Teori tersebut didukung oleh penelitian milik Kurniawan (2017) yang mendapatkan

hasil bahwa *punishment* turut memberi pengaruh untuk mengurangi perilaku menyimpang siswa. Kendati demikian, temuan di tempat penelitian justru bertolak belakang dengan teori *reward and punishment*..

Sejauh yang peneliti telusuri, setidaknya ada tiga penelitian yang hampir serupa. Pencarian dibatasi hanya sampai tahun 2015, artinya hanya penelitian di tahun 2015 hingga sekarang yang berlaku. Sebagai contoh, penelitian milik Ningsih di tahun 2015, penelitian lain milik Sari pada tahun 2018, dan Indah pada tahun 2016 mengukur persepsi siswa sebagai variabel yang memengaruhi variabel lain. Artinya, variabel persepsi siswa tidak digali lebih dalam karena subjek diharuskan memilih jawaban yang tersedia. Perbedaan ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini penulis laksanakan antara lain: subjek, subjek penelitian ini adalah siswa yang melanggar aturan sekolah dengan jumlah poin di atas 50; metode penelitian, metode yang digunakan penulis ialah metode kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan instrumen angket sehingga jawaban subjek menjadi terarah; terakhir adalah tujuan, tujuan penelitian sebelumnya adalah mencari korelasi antara variabel satu dengan variabel dua, sedangkan penelitian ini adalah menggali persepsi siswa sehingga peneliti tahu mengapa siswa tersebut melanggar aturan sekolah berulang kali.

Keunikan penelitian ini sehingga harus ditelusuri lebih dalam adalah dari sisi subjek. Subjek penelitian ini adalah para siswa yang sudah melanggar dan mendapat poin pelanggaran lebih dari satu kali. Penelitian ini membongkar isi pikiran siswa yang melanggar aturan berkali-kali tersebut, yang sebenarnya tahu itu salah namun mengulanginya lagi meski sudah mendapat poin pelanggaran. Poin pelanggaran terkesan tidak ampuh dalam menghentikan tindakan indisiplin siswa

Data awal yang diperoleh menunjukkan bahwa siswa tidak sepenuhnya mau menerima adanya sistem poin dan cenderung menolak. Hal itu terbukti dalam jawaban siswa ketika mengisi angket terbuka, tidak semua siswa paham, senang,

ingat dengan aturan, malahan siswa merasa terkekang dan cenderung menolak aturan sekolah. Kelima poin tersebut mendapat hasil yang mengarah pada penolakan dengan prosentase lebih dari setengah dari jumlah sampel. Hal tersebut juga didukung oleh banyaknya pelanggaran yang dilakukan siswa, entah mengulangi kesalahan yang sama atau kesalahan baru, sehingga aturan poin terkesan diabaikan. Maka, pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana persepsi terhadap hukuman poin pada siswa yang melanggar aturan sekolah?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana persepsi siswa yang melanggar aturan sekolah terhadap hukuman poin.

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak kepala sekolah, pihak kesiswaan, dan guru BK di SMA Al Azhar Syifa Budi Solo. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini bermanfaat untuk menentukan kebijakan sekolah dalam membuat aturan yang baru/revisi. Bagi kesiswaan, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam memberi perlakuan siswa yang kedapatan melanggar aturan. Bagi guru BK, hasil penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan tindakan preventif dan intervensi siswa yang kedapatan melanggar aturan. Ketiganya tentu didasarkan pada persepsi siswa terhadap hukuman poin. Hal ini bertujuan supaya pelanggaran dapat berkurang.